

ABSTRAK

STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS FISKAL DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009)

Oleh

Hafni Mariana Harahap

Lahirnya kebijakan otonomi daerah mengindikasikan sistem pemerintahan ke arah yang lebih desentralisasi, dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih diserahkan kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan asas otonomi yang luas nyata dan bertanggungjawab, oleh karena itu pemerintah daerah harus memiliki sumber daya keuangan yang handal yang terletak pada kemampuan daerahnya dalam mengatur, mengelola, menggali sumber-sumber keuangan sendiri dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Kenyataannya kebanyakan daerah kabupaten/kota di Indonesia dalam melaksanakan amanah otonomi daerah dihadapkan pada rendahnya kapasitas fiskal daerah yang dapat dilihat dari minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dibandingkan dengan perolehan subsidi dari pusat. Akibatnya semakin besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat, agar masalah tersebut tidak membawa pengaruh negatif kepada prospek penyelenggaraan otonomi daerah ke depannya, maka untuk mengatasinya, diperlukan suatu manajemen baru dalam keuangan daerah melalui pengambilan strategi khusus.

Penelitian ini mengambil studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah pasca pembentukan daerah otonomnya sejak tahun 1999, dengan tujuan untuk mendeskripsikan sekaligus menganalisis strategi pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerahnya untuk mendukung implementasi otonomi daerah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam menjalankan strategi yang telah dirumuskan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, pengamatan dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga hal yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil pengumpulan dan pengolahan data diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Lampung Tengah masih memiliki beberapa masalah yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas fiskal, yakni: (1) minimnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni, banyaknya objek retribusi daerah yang belum optimal, minimnya persentase penerimaan pajak daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum berperan signifikan, (2) rendahnya sarana dan prasarana untuk mewujudkan (*e-Government*) dalam memberikan pelayanan, (3) Sistem pemerintahan yang kaya struktur namun miskin fungsi, (4) Bantuan *specific grants* yang bersifat sentralisasi, (5) kecilnya jumlah pemasukan dari Dana Alokasi Umum (DAU). Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengembangkan berbagai kebijakan dan strategi yakni: (1) strategi meningkatkan kompetensi manajemen dan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah, (2) strategi perbaikan sistem

perpajakan, (3) strategi pembuatan peraturan daerah (perda) yang baru, (4) strategi revisi ulang peraturan daerah (perda), (5) strategi pengetatan sanksi atas pajak dan retribusi (6) strategi *cut-off* (pemangkasan terhadap dana belanja), (7) strategi pengembangan kerjasama, (8) strategi penyusunan anggaran dengan berbasis kinerja (ABK), (9) strategi pengembangan bisnis masyarakat daerah. Namun demikian pemerintah Kabupaten Lampung Tengah masih mengalami kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan strategi tersebut baik dari internal ataupun eksternal. Sebagai faktor penghambat internal yakni: (1) minimnya ketersediaan anggaran daerah, (2) kurangnya kuantitas dan skill (kualitas) para sumber daya aparatur dibidang keuangan, (3) kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pajak dan retribusi. Sedangkan faktor penghambat dari segi eksternal yakni (1) kurangnya pengawasan dari masyarakat dan media massa, (2) kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam membayar pajak dan retribusi, (3) keamanan dan lingkungan masyarakat yang tidak kondusif, (4) tingginya derajat sentralisasi dalam perpajakan, (5) kebijakan pemerintah terkait pinjaman daerah, (6) lemahnya penegakan hukum dalam pemberian sanksi terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang menunggak.

Kata Kunci: Otonomi Daerah dan Kapasitas Fiskal

ABSTRAC

THE STRATEGIES OF INCREASING FISCAL CAPACITY TO SUPPORT THE IMPLEMENTATION OF LOCAL AUTONOMY (A Study In Government Of Middle Lampung Regency 2009)

By

Hafni Mariana Harahap

Local Autonomy indicates the decentralization system of government, where local government has authority and responsibility to establish and manage regional area by applying the principle of autonomy. That is why; local government should have the strong financial source especially in managing and funding its own government. In fact, in applying the regional autonomy, most of regions in Indonesia have to face the minim regional fiscal capacity, if it is compared between regional income and the subsidy from the central government. It brings the effect for the local government to be depended toward the central government. In order to counter this problem so that it is can not affect the prospect of local autonomy appliances in the next time; it needs a new management of financial local government to take the special strategies.

This research taking case study in Regional Government of Middle Lampung after the appliance the autonomy in 1999, this research is to describe and analyze the strategies of local government if Center Lampung in increasing the regional fiscal capacity to support the appliance of local autonomy. This research will also describe the obstacle factors in applying the planned strategies. This research applies quantitative approach by which the data gathering technique are interview, observation and documentation. The analysis of the data uses interactive analysis model which consist of data reduction, data discussion and conclusion.

The result of collecting and analyzing data can be seen that local government face several problems related to the increasing fiscal capacity; (1) the regional income is too low which is caused by several factors, those are; regional retribution have not been optimal, the income from regional taxes is in low percentage, the significant role of *Badan Usaha Milik Daerah* is not optimal. (2) the facility and media to support “e-Government” in giving serving the society are low, (3) The complicated governmental structure but it is less function, (4) the system of specific grant is still centralized, (5) the minim income from General Allocation Monetary. Due to solving those problems, the government of Center Lampung develops a various policies and strategies, those are; (1) strategies of improving the managerial competence, human resource in organizing the regional monetary, (2) strategies of enhancing taxes system, (3) strategies in making new rules, (4) strategies in revising regional rules, (5) strategies strengthening sanctions of tax and retribution (6) strategies of Cut-off (budget), (7) strategies in establishing cooperation,(8) strategies in drafting the budget based professionalism, (9) strategies of establishing regional business society. However, the government of Center Lampung still finds problems which obstruct the appliance of those strategies not only internal but also external. The internal obstructions are (1) the minim of regional budget; (2) there are unprofessional workers in finance, (3) Socialization of the importance of taxes and retribution. While external obstructions are (1) lacking of the supervision from society and mass media, (2) being no awareness in paying the taxes and retributions, (3) safety and in conducive situation in society, (4) Centralization system of taxes, (5) the policies of government related to the regional loan, (6) the weakness of upholding the punishment toward arrears of taxes.

Key Word : Local Autonomy and Fiscal Capacity